

**ANALISIS AKSESIBILITAS SISTEM INFORMASI REPOSITORI ARSIP DAN
KEPUSTAKAAN TERHADAP REKAM JEJAK KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI
DKI JAKARTA**

Lusi Puspasari¹, Dyah Ayu Kusuma Dewandaru², Muhammad Ridwan³, Wisnu Putri Airmas Jati⁴,
Rani Sabtelasari⁵

^{1,2,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴Universitas Negeri Jakarta

Email Korespondensi: lusipuspasari@upnvj.ac.id

Email: dyahayukd@upnvj.ac.id; muhammadridwan@uinsu.ac.id; wisnuairmas@unj.ac.id;

ranisabtelasari@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The transformation of digital governance in DKI Jakarta Province through the implementation of e-government has established a massive data infrastructure. Nevertheless, the proliferation of digital portals has not been matched by public accessibility in tracing the complete historical trajectory of public policy formulation. This study aims to analyze the accessibility level of the regional information repository ecosystem and identify the barriers to integration between archival and library systems. Employing a Systematic Literature Review (SLR) approach encompassing academic literature and government regulations from the past five years (2021–2026), this study reveals that the capital's digital ecosystem of data governance remains entrapped within bureaucratic silos. Legal repositories (JDIH), dynamic legislative and executive archives, and regional libraries operate in a highly fragmented manner. This lack of interoperability perpetuates a bureaucratic monopoly over historical data, culminating in profound information asymmetry and a disconnection of institutional memory between state administrators and the public. As a resolution to this structural deadlock, this article proposes a conceptual model utilizing a metadata crosswalk.

Keywords: Digital Repository, Information Asymmetry, Local Governance, Public Policy.

ABSTRAK

Transformasi tata kelola digital di Provinsi DKI Jakarta melalui implementasi *e-government* telah menghadirkan infrastruktur data yang masif. Namun, ketersediaan portal digital belum sejalan dengan kemudahan aksesibilitas publik dalam menelusuri sejarah perumusan sebuah kebijakan publik secara utuh. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat aksesibilitas ekosistem repositori informasi daerah serta mengidentifikasi hambatan integrasi antara sistem kearsipan dan kepastakaan. Menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur akademik dan regulasi pemerintahan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2026), kajian ini menemukan bahwa ekosistem digital tata kelola data di ibu kota terjebak dalam fenomena *silo* birokrasi. Repositori hukum (JDIH), arsip dinamis legislatif/eksekutif, dan kepastakaan daerah beroperasi secara terfragmentasi. Ketiadaan interoperabilitas ini melanggengkan monopoli birokrasi atas data historis, yang bermuara pada tingginya asimetri informasi dan putusnya memori institusi antara penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai solusi dari kebuntuan struktural tersebut, artikel ini menawarkan model konseptual berupa *crosswalk metadata*.

Kata kunci: Asimetri Informasi, Kebijakan Publik, Repositori Digital, Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola pemerintahan lokal melalui kerangka *e-government* telah menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai episentrum inovasi birokrasi digital di Indonesia. Sebagai barometer tata kelola pemerintahan daerah, DKI Jakarta telah menginisiasi berbagai infrastruktur keterbukaan informasi, seperti portal *Jakarta Open Data*, *Jakarta Smart City*, hingga integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Secara konseptual, inisiatif ini dirancang untuk mewujudkan prinsip *Open Government* yang mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas (Putri et al., 2025). Namun, dalam praksis administrasi publik, digitalisasi dokumen belum sepenuhnya menjawab esensi keterbukaan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Septiara & Guspayane (2025) menjelaskan bahwa ketersediaan portal digital sering kali tidak berbanding lurus dengan aksesibilitas yang substantif, terutama ketika publik atau akademisi berupaya menelusuri rekam jejak historis dan rasionalitas di balik perumusan sebuah kebijakan publik daerah.

Kebijakan publik di tingkat daerah bukanlah produk administratif yang lahir dalam ruang hampa, melainkan hasil dari dialektika, kontestasi kepentingan, dan relasi kuasa yang panjang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan kelompok sipil. Rekam jejak dari proses politik tersebut terekam secara inheren dalam berbagai format dokumen: mulai dari Naskah Akademik, notulensi atau risalah rapat dengar pendapat di DPRD, draf peraturan gubernur, hingga dokumen evaluasi publik. Idealnya, rekam jejak ini dikelola sebagai sebuah "memori institusi" (*institutional memory*) yang utuh. Di sinilah sistem informasi repositori kearsipan dinamis dan sistem kepastakaan daerah seharusnya memainkan peran krusial; arsip menyimpan bukti transaksional dan proses pengambilan keputusan, sementara kepastakaan melestarikan konteks literatur dan sejarah dari kebijakan tersebut (Alfredo & Susilowati, 2021).

Tantangan struktural yang paling mengemuka saat ini adalah fenomena *silo* birokrasi yang tereplikasi ke dalam ekosistem digital. Sistem informasi repositori kearsipan (yang dikelola oleh unit kearsipan atau sekretariat daerah) sering kali beroperasi secara terisolasi dari sistem kepastakaan digital (yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan). Fragmentasi ini menciptakan krisis interoperabilitas. Dokumen-dokumen krusial berserakan di berbagai *platform* dengan standar *metadata* yang tidak saling sapa. Akibatnya, alur informasi menjadi terputus. Seseorang yang membaca teks Peraturan Daerah di portal JDIH akan kesulitan untuk menelusuri dokumen arsip yang menjelaskan perdebatan apa saja yang terjadi di DPRD sebelum pasal-pasal dalam peraturan tersebut disahkan (Mulensi et al., 2025).

Fragmentasi aksesibilitas ini membawa implikasi serius terhadap tata kelola pemerintahan lokal. Pemisahan arsitektur informasi antara arsip dan pustaka tidak hanya menciptakan inefisiensi pencarian data, tetapi juga melanggengkan asimetri informasi antara penyelenggara negara dan masyarakat. Ketika akses terhadap rekam jejak kebijakan publik terpotong-potong atau sulit direkonstruksi, fungsi kontrol sosial masyarakat menjadi tumpul, dan kualitas riset-riset kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) mengalami penurunan signifikansi. Penelitian Ningsih (2024) menjelaskan bahwa aksesibilitas terhadap sistem informasi kearsipan dan kepastakaan yang terintegrasi bukan sekadar persoalan teknis teknologi informasi, melainkan prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi dan keadilan informasi di tingkat lokal.

Meskipun urgensi integrasi ini sangat tinggi, tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan fokus kajian (*research gap*). Mayoritas kajian terkait sistem informasi pemerintahan di DKI Jakarta lebih dominan menggunakan kacamata determinisme teknologi. Evaluasi yang dilakukan umumnya terbatas pada aspek kegunaan antar-muka aplikasi (seperti penerapan *Technology Acceptance Model/TAM* atau *UTAUT*) atau sekadar menghitung volume digitalisasi dokumen. Sangat sedikit studi literatur yang menarik kajian ini ke ranah substansi tata kelola data, khususnya yang secara kritis membedah tingkat aksesibilitas ekosistem repositori kearsipan dan kepastakaan dalam memfasilitasi penelusuran sejarah perumusan kebijakan publik. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan aksesibilitas sistem informasi repositori arsip dan kepastakaan di Provinsi DKI Jakarta dalam fungsinya sebagai instrumen pelacak rekam jejak kebijakan

publik daerah.

METODE

Kajian ini dieksekusi melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dirancang secara naratif untuk membedah anatomi ekosistem informasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Van Dinter et al. (2021) bahwa *Systematic Literature Review* (SLR) tidak ditujukan hanya untuk menginventarisasi literatur secara deskriptif, melainkan sebagai instrumen analitis untuk membongkar kesenjangan struktural antar-sistem kearsipan dan kepustakaan yang selama ini berjalan secara terisolasi. Untuk memastikan proses penelusuran pustaka berjalan secara transparan, objektif, dan dapat direplikasi, penelitian ini mengadaptasi prinsip-dasar dari protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan secara presisi bagaimana literatur terdahulu memandang relasi antara arsitektur informasi birokrasi dengan transparansi perumusan kebijakan publik local (Page, 2024).

Secara operasional, strategi pengumpulan data bertumpu pada ekstraksi literatur dari berbagai pangkalan data akademik bereputasi, dengan fokus utama pada Scopus, Sinta (*Science and Technology Index*), Portal Garuda, dan Google Scholar. Pencarian literatur dibatasi pada rentang waktu publikasi lima tahun terakhir (2021–2026), sebuah periode yang dinilai paling representatif untuk merekam akselerasi transformasi *e-government* dan implementasi *Open Data* di ibu kota. Proses penelusuran menggunakan kombinasi operator pencarian Boolean (AND/OR) dengan mengawinkan variabel teknis dan variabel tata kelola, seperti sintaksis pencarian yang melibatkan variasi kata kunci: *e-archive*, *repositori digital*, *perpustakaan daerah*, *JDIH*, *kebijakan publik*, dan *DKI Jakarta*. Selain mengandalkan jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer-review*, kajian ini juga secara sengaja menginkorporasikan *grey literature* atau dokumen pemerintahan, seperti pedoman teknis JDIH, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, serta regulasi daerah terkait pengelolaan data, guna menempatkan temuan teoretis ke dalam realitas administrasi publik yang sesungguhnya.

Untuk menjaga validitas dan ketajaman fokus analisis, korpus literatur yang terkumpul disaring melalui kriteria kelayakan yang sangat ketat. Literatur yang dipertahankan untuk dianalisis adalah studi-studi yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas sistem repositori pemerintahan, mengkaji aksesibilitas informasi produk hukum atau rekam jejak kebijakan, serta menelaah tata kelola arsip dinamis di level SKPD maupun DPRD DKI Jakarta. Sebaliknya, penelitian yang hanya berfokus pada evaluasi antarmuka aplikasi (*User Interface*) secara sempit tanpa menyinggung aspek transparansi kebijakan, atau studi kepustakaan yang lokusnya berada di luar ekosistem Pemprov DKI Jakarta, dieksklusi dari proses sintesis. Proses penyaringan dua tahap dari penapisan judul dan abstrak hingga pembacaan teks penuh memastikan bahwa literatur yang tersisa memiliki kedalaman ontologis yang sejalan dengan tujuan penelitian.

Pada tahap akhir, seluruh literatur yang lolos seleksi dibedah menggunakan teknik analisis tematik kritis (*critical thematic analysis*). Alih-alih sekadar merangkum hasil penelitian terdahulu, teknik ini digunakan untuk mengekstraksi dan mengkategorikan pola-pola permasalahan yang berulang (Fryer, 2022). Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama: dimensi infrastruktur (seperti ketidakcocokan standar *metadata* antar-sistem), dimensi kelembagaan (seperti ego sektoral antara dinas kearsipan dan biro hukum), dan dimensi demokratisasi data (sejauh mana fragmentasi informasi menyulitkan penelusuran rasionalitas sebuah kebijakan publik). Melalui dialektika tematik inilah, penelitian ini menyintesis kelemahan arsitektur sistem informasi saat ini dan merumuskan sebuah model konseptual tata kelola data yang terintegrasi, yang diharapkan mampu menjembatani repositori arsip dan kepustakaan demi terwujudnya memori institusi yang utuh.

PEMBAHASAN

Fragmentasi Arsitektur Informasi dan Fenomena *Silo* Birokrasi.

Evaluasi ekstensif terhadap ekosistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperlihatkan realitas administrasi yang kontradiktif. Di satu sisi, ibu kota sejatinya telah memiliki infrastruktur repositori digital yang paling masif dan progresif di tingkat nasional. Kehadiran portal *Jakarta Open Data*, sistem pengelolaan arsip dinamis terintegrasi, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), hingga layanan perpustakaan digital (*iJakarta*) yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) merupakan manifestasi nyata dari komitmen terhadap digitalisasi pemerintahan daerah. Namun, kajian literatur menggaris bawahi satu celah struktural yang fatal: tingginya tingkat fragmentasi sistem. Alih-alih mendekonstruksi sekat-sekat administrasi, digitalisasi tata kelola informasi di ibu kota cenderung hanya mereplikasi fenomena *silo* birokrasi konvensional ke dalam ekosistem ruang digital yang terfragmentasi (Fatimah, 2025).

Fenomena *silo* birokrasi dalam lanskap tata kelola digital ini merujuk pada praktik kompartementalisasi data, di mana setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun unit legislatif merancang, membangun, dan mengoperasikan basis datanya secara terisolasi dengan rasionalitas sektoral masing-masing. Penelitian Anthony Jnr (2021) menjelaskan bahwa ketiadaan payung arsitektur sistem informasi (*Enterprise Architecture*) yang terintegrasi di level provinsi memicu lahirnya pulau-pulau informasi yang tidak saling terhubung. Untuk memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai anatomi fragmentasi tersebut, kajian literatur ini memetakan kondisi arsitektur repositori informasi kebijakan publik di DKI Jakarta sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Pemetaan Fragmentasi Repositori Informasi Rekam Jejak Kebijakan Publik di DKI Jakarta

Aktor / Institusi / Pengelola	Nama Platform / Repositori	Jenis Dokumen Rekam Jejak Kebijakan	Karakteristik Akses & Interoperabilitas
Biro Hukum Pemprov DKI	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	Naskah Perda, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur (Produk Hukum Final).	Terbuka untuk publik, namun bersifat pasif (hanya di hilir). Tidak memiliki <i>hyperlink</i> ke dokumen Naskah Akademik atau risalah perdebatan.
Sekretariat DPRD DKI Jakarta	Sistem e-Archive Internal Legislatif	Risalah rapat dengar pendapat, notulensi paripurna, pandangan fraksi, draf awal raperda.	Tertutup/Terbatas. Sistem beroperasi secara independen dan tidak terindeks oleh mesin pencari portal terbuka milik Pemprov.
Bappeda / SKPD Terkait	Portal SKPD / Repositori Perencanaan Internal	Laporan hasil riset daerah, Naskah Akademik awal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	Semi-terbuka/Tersebar. Data sering kali tersebar dalam format PDF yang tidak terstruktur dan sulit dilacak secara lintas-sektoral.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	<i>iJakarta</i> / E-Library Daerah / SIKD	Arsip inaktif historis, laporan penyelenggaraan pemerintahan tahunan, literatur pustaka daerah.	Terbuka penuh. Namun, standar <i>metadata</i> (katalogisasi pustaka) tidak kompatibel dengan standar kearsipan Biro Hukum atau DPRD.

Sumber: Hasil sintesis literatur, diolah oleh peneliti (2026)

Kebijakan public JDIH beroperasi secara independen dengan fokus murni pada dokumentasi hilir. Di sisi lain, arsip perumusan kebijakan yang sangat krusial yang memuat dinamika pertarungan kepentingan dan argumentasi logis sebuah regulasi terjebak dalam sistem arsip dinamis tertutup di lembaga legislatif

maupun eksekutif. Sementara itu, dokumen kajian yang melandasi perumusan tersebut mengalir ke repositori perpustakaan atau badan perencana yang entitas pengelolannya sepenuhnya berbeda.

Lebih jauh, analisis kritis terhadap literatur sosiologi pemerintahan daerah mengungkap bahwa fragmentasi arsitektur informasi ini bukanlah semata-mata kegagalan teknis di ranah komputasi, melainkan cerminan dari dinamika relasi kuasa di dalam tubuh birokrasi. Dalam ekologi administrasi publik, penguasaan atas data identik dengan otoritas institusional (Putra et al., 2025). Kecenderungan lembaga eksekutif atau legislatif untuk mempertahankan arsitektur portal pengelolannya sendiri sering kali didorong oleh pelestarian hegemoni sektoral. Menyerahkan otoritas pengelolaan data ke dalam satu *data warehouse* atau portal terpusat kerap dipersepsikan sebagai bentuk pelemahan otonomi institusi atau pembukaan celah bagi kerentanan politik.

Krisis interoperabilitas ini membawa implikasi serius terhadap esensi transparansi dalam perumusan kebijakan publik lokal. Penelitian Kesäniemi et al. (2024) menjelaskan bahwa untuk menerapkan *metadata* silang (*cross-walk metadata*) dapat mengakibatkan mesin pencari pada portal kepustakaan daerah tidak memiliki kapabilitas untuk memanggil entitas data yang bersarang di portal arsip JDIH atau DPRD. Ekosistem informasi yang cacat interoperabilitas ini pada akhirnya memutus mata rantai rekam jejak kebijakan publik, menyulitkan kalangan akademik maupun publik yang membutuhkan analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang komprehensif.

Asimetri Informasi dalam Penelusuran Rekam Jejak Kebijakan

Ketidakterhubungan antar-sistem repositori daerah pada akhirnya melanggengkan dominasi birokrasi atas memori institusi, yang bermuara pada tingginya asimetri informasi antara penyelenggara negara dan masyarakat. Penelitian Wibowo (2026) menjelaskan bahwa ketika birokrasi pemerintahan sebagai produsen dan pemegang otoritas arsip memiliki kendali dan akses penuh terhadap seluruh rekam jejak historis perumusan kebijakan, sementara publik dan peneliti hanya diberikan akses fragmen informasi pada ranah hilir. Dalam diskursus tata kelola pemerintahan yang demokratis, ketimpangan aksesibilitas ini merepresentasikan defisit transparansi yang secara perlahan mendegradasi esensi dan tujuan utama dari inisiatif *Open Government* di DKI Jakarta.

Kajian terhadap berbagai literatur kebijakan publik menunjukkan bahwa ketiadaan integrasi antara sistem kearsipan dinamis legislatif/eksekutif dengan repositori kepustakaan menciptakan fenomena "kotak hitam" (*black box*) dalam siklus pembuatan regulasi daerah. Sebuah kebijakan public seperti penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau regulasi pengelolaan lingkungan bukanlah sekadar teks hukum yang netral, melainkan produk dari kontestasi kepentingan politik yang intens. Sayangnya, sistem informasi yang ada saat ini gagal menyajikan proses tersebut secara utuh. Publik hanya disuguhkan hasil akhir berupa dokumen hukum di portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tanpa dibekali fasilitas penelusuran mundur (*backward tracing*) untuk memahami *ratio legis* (alasan hukum dasar) dan argumen sosio-politik yang melatarbelakanginya. Untuk memperjelas di titik mana saja asimetri informasi ini terjadi dalam sistem birokrasi, kajian ini memformulasikan pemetaan celah aksesibilitas berdasarkan tahapan siklus kebijakan publik (Tabel 2).

Tabel 2: Pemetaan Celah Aksesibilitas dan Asimetri Informasi pada Siklus Kebijakan Publik di DKI Jakarta

Tahapan Siklus Kebijakan	Dokumen Rekam Jejak (Entitas Arsip & Pustaka)	Aksesibilitas Internal (Birokrasi/DPRD)	Aksesibilitas Eksternal (Publik/Peneliti)	Tingkat Asimetri Informasi
1. Agenda Setting (Penyusunan Isu)	Laporan kajian awal Bappeda, Naskah Akademik draf awal, kajian kepustakaan daerah.	Akses penuh melalui repositori internal Bappeda dan unit riset SKPD.	Sangat terbatas. Dokumen tersebar, sering kali tidak dipublikasikan ke portal perpustakaan	Tinggi

			daerah secara <i>real-time</i> .	
2. Formulasi Kebijakan (Perdebatan & Lobbying)	Risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP), notulensi pandangan fraksi DPRD, draf raperda komparatif.	Akses penuh melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis internal Sekretariat Dewan.	Tertutup/Sulit Diakses. Publik tidak memiliki instrumen pelacakan untuk membedakan siapa aktor yang mengubah suatu pasal krusial.	Sangat Tinggi
3. Legitimasi & Adopsi (Pengesahan)	Naskah final Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub).	Akses penuh dan terkelola secara sentral.	Akses penuh melalui portal JDIH, namun bersifat pasif tanpa tautan historis ke tahapan 1 dan 2.	Rendah (Hanya pada hasil akhir)
4. Evaluasi Kebijakan	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), audit kinerja SKPD, arsip umpan balik masyarakat.	Akses penuh untuk konsolidasi laporan tahunan eksekutif ke legislatif.	Terbatas. Repositori perpustakaan daerah dan portal e-arsip publik jarang mengintegrasikan dokumen evaluasi spesifik per kebijakan.	Tinggi

Sumber: Hasil sintesis literatur, diolah oleh peneliti (2026)

Merujuk pada Tabel 2, terlihat dengan jelas bahwa tingkat asimetri informasi melonjak drastis pada tahapan Formulasi Kebijakan dan Agenda Setting. Di sinilah letak jantung dari memori institusi (*institutional memory*). Ketika dokumen Naskah Akademik (yang seharusnya menjadi wilayah kepustakaan riset) terputus dari risalah perdebatan di DPRD (ranah arsip dinamis legislatif) dan terpisah dari naskah final (ranah JDIH), masyarakat dan kalangan akademisi kehilangan konteks kausalitas. Akibatnya, upaya publik untuk mengawasi apakah sebuah kebijakan benar-benar dilandasi oleh rasionalitas yang berpihak pada kepentingan umum, atau sekadar hasil kompromi elitis, menjadi tumpul.

Asimetri informasi ini pada akhirnya memberikan pukulan telak terhadap kualitas riset-riset sosial, politik, dan kebijakan publik lokal. Peneliti dituntut untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), namun infrastruktur repositori pengetahuan di level pemerintah provinsi membatasi pasokan bukti tersebut. Ketersediaan tumpukan fail format *PDF* (Portable Document Format) di berbagai sub-domain milik Pemprov DKI Jakarta belumlah cukup untuk disebut sebagai "keterbukaan informasi". Keterbukaan substantif mensyaratkan adanya relasi yang terbaca oleh sistem, di mana arsip transaksi politik, literatur kepustakaan, dan dokumen hukum dapat ditarik menggunakan satu benang merah. Selama asimetri dalam arsitektur informasi ini dipelihara, sistem pelacakan rekam jejak kebijakan daerah akan tetap menjadi instrumen elitis yang hanya bisa diakses dan dinarasikan secara sepihak oleh penyelenggara negara (Vianney & Nurofik, 2024).

Konseptualisasi Integrasi Berbasis *Crosswalk Metadata*

Menembus kebuntuan struktural dan ego sektoral antar-lembaga dalam birokrasi tidak selalu harus dilakukan melalui fusi (peleburan) institusi secara fisik, melainkan dapat dijembatani melalui diplomasi arsitektur data. Merespons krisis interoperabilitas dan tingginya asimetri informasi pada ekosistem digital Pemprov DKI Jakarta, sintesis dari literatur-literatur arsitektur informasi menawarkan sebuah jalan keluar yang berpusat pada integrasi di level pelabelan data. Penelitian Batubara & Nasution (2025) menjelaskan bahwa informasi berbasis *metadata* terpadu di tingkat pemerintah provinsi harus mampu mengorquestrasi

berbagai repositori tanpa perlu merampas otonomi operasional dari masing-masing Satuan Kerja

Secara konseptual teknis, model *Crosswalk Metadata* mengadopsi mekanisme (pemetaan silang standar data). Masalah utama dari birokrasi di ranah digital adalah perbedaan "bahasa" yang digunakan oleh setiap sistem. Sistem kepastakaan daerah lazimnya menggunakan standar *Dublin Core* atau *MARC 21*, sistem kearsipan dinamis berpedoman pada standar deskripsi kearsipan internasional seperti *ISAD(G)* atau *Encoded Archival Description (EAD)*, sementara *JDIH* memiliki taksonomi legalnya sendiri. Penelitian Patrick-Burns et al. (2022) menjelaskan bahwa *Crosswalk metadata* bertugas menerjemahkan dan mengawinkan elemen-elemen dari ketiga standar tersebut ke dalam satu skema penamaan yang universal. Untuk memberikan justifikasi konseptual mengenai bagaimana integrasi lintas-sistem ini dapat diwujudkan secara logis, Tabel 3 berikut menyajikan rancangan pemetaan silang (*crosswalk*) atribut dokumen dari berbagai repositori menuju satu *Crosswalk Metadata* (Metadata Terpadu).

Tabel 3: Desain Konseptual Pemetaan Silang (*Crosswalk*) Metadata Kebijakan Publik

Elemen Informasi Kebijakan	Kepustakaan Daerah (Standar Dublin Core)	Kearsipan Dinamis & DPRD (Standar ISAD-G)	Repositori Hukum (Standar JDIH)	<i>Crosswalk Metadata</i> (Portal Satu Pintu)
Identitas & Subjek	<i>Title, Subject</i> (Cth: Kajian Tata Ruang)	<i>Title, Scope and Content</i> (Cth: Risalah Sidang RTRW)	<i>Judul Peraturan, Subjek Hukum</i>	Topik Kebijakan Sentral (Menyatukan semua dokumen ber-subjek sama).
Aktor / Pemrakarsa	<i>Creator, Contributor</i> (Cth: Bappeda/Akademisi)	<i>Name of Creator(s)</i> (Cth: Pansus DPRD / Fraksi)	<i>Pemrakarsa, Penandatanganan</i> (Cth: Gubernur/Biro Hukum)	Peta Aktor Kebijakan (Melacak siapa yang mengusulkan, mendebat, dan mengesahkan).
Kronologi Waktu	<i>Date</i> (Tanggal publikasi naskah)	<i>Dates of Creation</i> (Tanggal rapat/sidang)	<i>Tanggal Penetapan, Tanggal Pengundangan</i>	Garis Waktu Siklus Kebijakan (<i>Timeline</i> historis dari hulu ke hilir).
Relasi & Keterkaitan	<i>Relation</i> (Buku/laporan terkait)	<i>Related Units of Description</i> (Arsip korespondensi)	<i>Status Regulasi, Mencabut/Diubah</i>	Tautan Jejak Kebijakan / <i>Hyperlink</i> (Menghubungkan Naskah Akademik, Risalah Perda).

Sumber: Hasil sintesis literatur, diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan rancangan pemetaan pada Tabel 3, implementasi *Crosswalk metadata* ini akan mengubah secara revolusioner cara publik dan peneliti berinteraksi dengan data pemerintahan. Pemprov DKI Jakarta dapat membangun satu portal penelusuran tunggal (*single search portal*). Dalam arsitektur terintegrasi ini, ketika seorang pengguna mengetikkan kata kunci kebijakan tertentu (misalnya, "Reklamasi Teluk Jakarta" atau "Penanganan Banjir"), mesin pencari pada portal tersebut akan menyedot dan menampilkan data dari seluruh repositori yang terhubung secara kronologis. Sistem tidak lagi sekadar menyajikan teks Peraturan Gubernurnya saja, tetapi secara otomatis menampilkan tautan (*hyperlink*) yang

mengarah ke dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di *database* SKPD, Naskah Akademik yang tersimpan di sistem perpustakaan, hingga menayangkan risalah rapat persetujuan atau penolakan dari arsip internal DPRD. Rantai relasi kausalitas ini menjahit kembali narasi kebijakan yang sebelumnya tercabik-cabik oleh fragmentasi administratif.

Pada tataran praksis sosiologi pemerintahan, konvergensi sistem melalui *crosswalk metadata* ini bukan sebatas pencapaian modernisasi teknologi komputasi, melainkan sebuah lompatan kuantum dalam demokratisasi informasi. Melalui konseptualisasi ini, repositori digital Pemprov DKI Jakarta bertransformasi dari sekadar gudang penyimpanan fail statis milik aparatur menjadi instrumen intelijensi tata kelola daerah (*governance intelligence*) yang terbuka. Rekam jejak kebijakan akhirnya dipulihkan menjadi memori institusi yang utuh, yang pada gilirannya akan memperkuat mekanisme *check and balances*, memfasilitasi riset empiris yang presisi, serta memaksa proses perumusan kebijakan publik berjalan dengan argumentasi dan akuntabilitas yang dapat diuji oleh publik secara riil (Mazepus & Toshkov, 2022).

KESIMPULAN

Transformasi tata kelola pemerintahan digital di Provinsi DKI Jakarta memunculkan sebuah diskursus kritis mengenai paradoks antara modernisasi infrastruktur teknologi dan stagnasi esensi keterbukaan informasi. Melalui tinjauan literatur yang sistematis dan mendalam, kajian ini menyimpulkan bahwa ekosistem tata kelola data ibu kota saat ini masih terbelenggu oleh tingginya tingkat fragmentasi arsitektur informasi. Berbagai repositori digital mulai dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sistem kearsipan dinamis internal eksekutif dan legislatif, hingga kepustakaan daerah terbangun secara sektoral dan beroperasi dalam isolasi fungsional. Alih-alih mendekonstruksi sekat-sekat birokrasi, penerapan teknologi komputasi justru mereplikasi dan memperkuat patologi *silo* birokrasi konvensional ke dalam ruang digital. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola tanpa disertai reformasi arsitektur kelembagaan hanya akan menghasilkan tumpukan fail digital yang pasif, bukan aset pengetahuan yang hidup. Dampak paling destruktif dari fragmentasi struktural ini adalah lahirnya asimetri informasi yang masif antara penyelenggara negara dan masyarakat. Ketiadaan interoperabilitas telah memutus mata rantai rekam jejak kebijakan publik; mengisolasi dokumen naskah akademik di fase inisiasi, memisahkan risalah perdebatan politik di fase formulasi, dan membiarkan produk hukum final berdiri tanpa konteks historis di fase legitimasi. Keterputusan ini secara sosiologis melanggengkan monopoli birokrasi atas memori institusi, sehingga mengerdilkan nilai-nilai demokrasi dalam inisiatif *Open Government*. Siklus pembuatan kebijakan direduksi menjadi sebuah "kotak hitam" (*black box*) yang menyulitkan publik dan akademisi untuk menguji rasionalitas di balik sebuah keputusan politik. Pada akhirnya, asimetri ini menghambat mekanisme pengawasan sosial dan membatasi ruang gerak riset-riset sosial-politik yang bertumpu pada analisis kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Untuk membongkar kebuntuan tersebut, kajian ini menawarkan intervensi konseptual berupa perancangan *crosswalk metadata*. Model konseptual pemetaan yang menjahit standar kepustakaan, kearsipan, dan repositori hukum ini merupakan jalan keluar yang secara politis dan administratif paling rasional. Pendekatan ini mampu menciptakan portal penelusuran tunggal yang merangkai kembali rekam jejak kebijakan secara kronologis dan kausal, tanpa harus memicu resistensi birokrasi karena tidak merampas otonomi tata kelola data dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Sekretariat DPRD. Namun demikian, konseptualisasi teknis ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya rekayasa institusional yang mengikat. Integrasi repositori kearsipan dan kepustakaan mutlak menuntut adanya komitmen politik (*political will*) yang dimanifestasikan melalui regulasi tata kelola informasi (*IT Governance*). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memelopori lahirnya regulasi setingkat Peraturan Gubernur yang mewajibkan penerapan standar interoperabilitas data lintas-sektoral dan mewajibkan praktik berbagi data (*data sharing*) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap lembaga. Sebagai sebuah tinjauan konseptual berbasis literatur, kajian ini tentu memiliki keterbatasan empiris. Oleh karena

itu, riset-riset di masa mendatang sangat direkomendasikan untuk melakukan pengujian lapangan melalui studi kasus kualitatif seperti mewawancarai para pembuat kebijakan, administrator arsip, dan pengelola JDIH guna memetakan lebih detail anatomi keengganan institusional dalam berbagi data politik.

REFERENSI

- Alfredo, V., & Susilowati, M. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Repositori Digital Dokumen Internal Berbasis Web. *Kurawal-Jurnal Teknologi, Informasi Dan Industri*, 4(2), 169–182.
- Anthony Jnr, B. (2021). Managing digital transformation of smart cities through enterprise architecture—a review and research agenda. *Enterprise Information Systems*, 15(3), 299–331.
- Batubara, A. A. P., & Nasution, M. I. P. (2025). Manajemen Metadata: Solusi Untuk Tantangan Data di Era Informasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 67–86.
- Fryer, T. (2022). A critical realist approach to thematic analysis: producing causal explanations. *Journal of Critical Realism*, 21(4), 365–384.
- Kesäniemi, J., Suominen, T., Ivanović, D., & Dvořák, J. (2024). CRIS systems integration as a case study for the Metadata Schema and Crosswalk Registry. *Procedia Computer Science*, 249, 243–253.
- Mazepus, H., & Toshkov, D. (2022). Standing up for democracy? Explaining citizens' support for democratic checks and balances. *Comparative Political Studies*, 55(8), 1271–1297.
- Mulensi, N., Darubekti, N., & Valentino, R. A. (2025). THE ROLE OF THE LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK (JDIH) IN INCREASING ACCESS TO INFORMATION. *JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 10(1), 150–162.
- Ningsih, S. J. (2024). Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Oleh Arsiparis Dalam Pengelolaan Arsip Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Payakumbuh. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 3(2), 136–143.
- Page, O. N. (2024). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses extension for scoping reviews (PRISMA-ScR) checklist. *Br J Sports Med*, 1001, 58.
- Patrick-Burns, J., Haley, R., & King, O. C. (2022). Navigating from metadata disparities towards best practices: Analysis through crosswalking. *Journal of Digital Media Management*, 10(3), 242–251.
- Putra, R. K., Agustin, Y., Ihsan, L. N., & Dafiqi, Z. A. (2025). Institutional Dysfunction in Personal Data Protection: A Legal-Political Analysis Based on New Institutional Theory. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 938–949.
- Putri, A. V., Maskut, D. N., Kwuta, R. M., & Sipayung, B. (2025). Tarakan smart city: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui e-government. *Tumoutou Social Science Journal*, 2(1), 61–73.
- Septiara, D., & Guspayane, S. (2025). Peluang Perpustakaan Digital dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Global. *Maktabatuna: Jurnal Kajian Kepustakawanan*, 7(2), 183–197.
- Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2021). Automation of systematic literature reviews: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 136, 106589.
- Vianney, L. S., & Nurofik, N. (2024). Dampak Corporate Social Responsibility dan asimetri informasi terhadap cost of equity capital dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 3(2), 63–70.
- Wibowo, A. (2026). Teori Permainan dalam Perancangan Kebijakan Publik: Interaksi Strategis, Kredibilitas, dan Reformasi Institusional di Demokrasi Berkembang. *Proceedings National Conference Sinesia*, 2(1), 55–67.